

**LAPORAN REVIU  
PENCAPAIAN KINERJA**

**TRIWULAN 2  
2022**

**BPK PERWAKILAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KATA PENGANTAR**  
**KEPALA BPK PERWAKILAN D.I. YOGYAKARTA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.



Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya, Laporan Reviu Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan (D.I.) Yogyakarta Triwulan II Tahun 2022 telah selesai disusun yang berisi pencapaian dari pelaksanaan 13 Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum, Perwakilan D.I. Yogyakarta terus berupaya dengan optimal dalam mencapai target yang ditetapkan walaupun belum sepenuhnya tercapai yang terlihat dari total skor kinerja menurut Aplikasi PRISMA pada Triwulan II Tahun 2022

yaitu sebesar 62.71

Kedepannya diharapkan Laporan Reviu Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta Triwulan II Tahun 2022 ini dapat digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan pencapaian IKU Tahun 2022 sehingga target-target kinerja BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta dapat tercapai.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Juli 2022

Kepala Perwakilan,



Jariyatna

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR KEPALA PERWAKILAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta.....	2
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta.....	4
1. Sekretariat Perwakilan.....	4
2. Subauditorat BPK.....	6
D. Sumber Daya BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta.....	7
1. Sumber Daya Manusia (SDM).....	7
2. Sumber Daya Keuangan .....	11
3. Sarana dan Prasarana .....	11
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN D.I. Yogyakarta .....	13
A. Rencana Strategis BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta .....	13
B. Pernyataan Komitmen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta.....	16
C. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2022 BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta .....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA) BPK PERWAKILAN D.I. YOGYAKARTA.....	32
A. Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta .....	32
B. Indikator Kinerja BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta.....	32
1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan .....	33
2. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan .....	34
3. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan .....	34
4. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional.....	34
5. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan .....	35
6. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal .....	35

7. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK .....	36
8. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP .....	36
9. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi .....	37
10. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan .....	37
11. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi .....	38
12. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi .....	39
13. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran .....	39
C. Realisasi Anggaran Perwakilan .....	40
BAB IV PENUTUP	45
LAMPIRAN	

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Struktur Organisasi BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta..... 4
Gambar 1.2	Data Pegawai Berdasarkan Golongan ..... 8
Gambar 1.3	Data Pegawai Menurut Jabatan Pegawai ..... 9
Gambar 1.4	Data Pegawai Menurut Jabatan Tenaga Tidak Tetap ..... 9
Gambar 1.5	Data Pegawai Menurut Umur..... 10
Gambar 1.6	Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan..... 11
Gambar 2.1	Peta Strategis AKN V..... 12

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Pegawai menurut Jenjang Pangkat dan Golongan.....	7
Tabel 1.2 Data Pegawai menurut Jabatan Struktural .....	8
Tabel 1.3 Data Pegawai menurut Jabatan pegawai .....	8
Tabel 1.4 Data Pegawai menurut Jabatan Tenaga Tidak Tetap (TTT) .....	10
Tabel 1.5 Data Pegawai menurut Umur.....	10
Tabel 1.6 Data Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Pegawai.....	10
Tabel 1.7 Anggaran BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta Tahun 2022.....	11
Tabel 2.1 Sasaran, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan D.I.Yogyakarta.....	13
Tabel 2.2 Rencana Aksi 2022 Perwakilan D.I. Yogyakarta.....	15
Tabel 3.1 Pencapaian IKU BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta Triwulan II Tahun 2022.....	25
Tabel 3.2 Tabel 3.2 Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2022....	37

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Kewajiban untuk menyusun Laporan AKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Lampiran II Huruf D tentang Penyampaian Laporan Kinerja yang menyatakan bahwa Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja.

Dalam menjalankan tugas yang diemban, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp15.577.574.000,00. Alokasi anggaran tersebut diatas digunakan untuk mencapai visi dan misi BPK sebagaimana ditetapkan dalam Renstra 2020-2024 melalui rangkaian target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai dan telah dituangkan dalam Pencapaian Kinerja 2022 yang telah disepakati.

### **B. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN D.I. YOGYAKARTA**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantu oleh pelaksana BPK yang salah satunya adalah Auditorat Keuangan Negara (AKN) V. AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. Dalam pelaksanaan tugasnya AKN V didukung oleh beberapa satker eselon II. BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta merupakan salah satu perwakilan di bawah AKN V. Sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, BPK Perwakilan D.I Yogyakarta mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah D.I Yogyakarta, kota/kabupaten di D.I Yogyakarta, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Sedangkan fungsi BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta adalah :

1. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan D.I Yogyakarta dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan D.I Yogyakarta berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan D.I Yogyakarta;
3. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan D.I Yogyakarta;
4. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan D.I Yogyakarta;



6. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan D.I Yogyakarta;
7. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan D.I Yogyakarta;
8. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan D.I Yogyakarta;
9. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan D.I Yogyakarta, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan D.I Yogyakarta, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan D.I Yogyakarta dengan aparat pengawasan intern pada entitas terpeiksa;
12. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan D.I Yogyakarta;
13. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan D.I Yogyakarta yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan D.I Yogyakarta untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan D.I Yogyakarta;
18. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan D.I Yogyakarta;
19. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan D.I Yogyakarta; dan
20. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

### C. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN D.I. YOGYAKARTA



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta**

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta adalah unsur pelaksana BPK, yang berada dibawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V (AKN V) yang terdiri dari :

1. Sekretariat Perwakilan;
2. Subauditorat D.I Yogyakarta; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun penjabaran tugas dari masing-masing unsur pelaksana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan D.I Yogyakarta.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan D.I Yogyakarta;
- b. Pengurusan sumber daya manusia, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan D.I Yogyakarta;
- c. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan D.I Yogyakarta;
- d. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan D.I Yogyakarta dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan D.I Yogyakarta;
- f. Penyimpanan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan D.I Yogyakarta; dan
- g. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan D.I Yogyakarta.

Sekretariat Perwakilan BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta di Yogyakarta terdiri dari :

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan D.I Yogyakarta, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan D.I Yogyakarta.

- b. Subbagian Sumber Daya Manusia

Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan D.I Yogyakarta.

- c. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan D.I Yogyakarta.

d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan D.I Yogyakarta.

e. Subbagian Hukum.

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan D.I Yogyakarta.

2. Subauditorat D.I Yogyakarta

Subauditorat D.I. Yogyakarta mempunyai menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan D.I Yogyakarta. Selain itu subauditorat mempunyai fungsi tugas pokok diantaranya adalah pada lingkup Pemerintah D.I. Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- 1) Merumuskan rencana kegiatan;
- 2) Mengusulkan tim pemeriksa;
- 3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- 4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
- 5) Menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- 6) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- 8) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas diperiksa;
- 9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- 10) Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- 11) Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan.

#### D. SUMBER DAYA BPK PERWAKILAN D.I. YOGYAKARTA

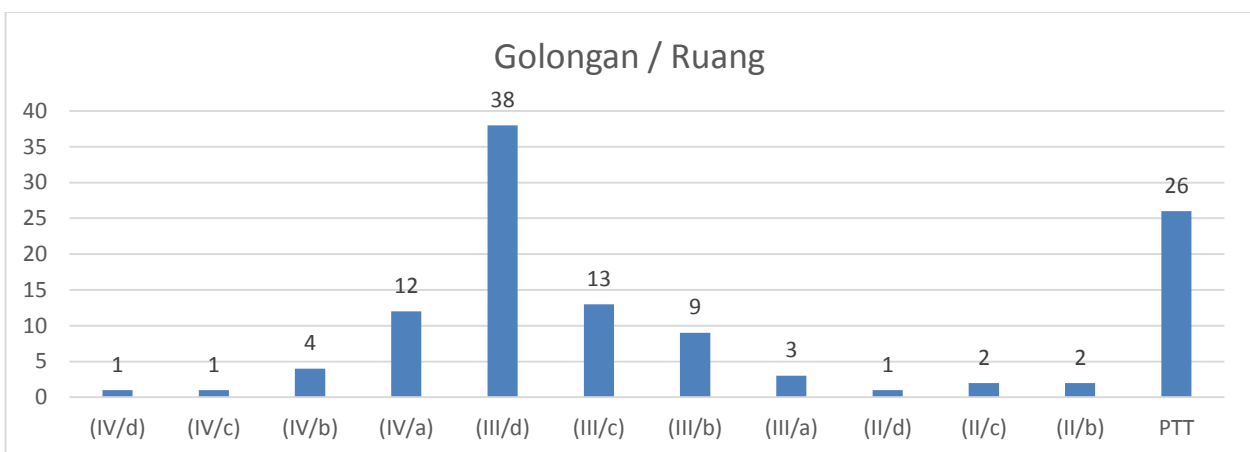
##### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta sampai dengan per 30 Juni 2022 memiliki jumlah SDM sebanyak 112 orang yang terdiri dari 83 pegawai PNS, 3 pegawai CPNS, dan 26 pegawai tidak tetap/kontrak. Berikut ini adalah data bezetting pegawai tetap di BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Data Pegawai berdasarkan jenjang Pangkat dan Golongan

**Tabel 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan**

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Madya	IV/d	1
2.	Pembina Utama Muda	IV/c	1
3.	Pembina Tingkat I	IV/b	4
4.	Pembina	IV/a	12
5.	Penata Tingkat I	III/d	38
6.	Penata	III/c	13
7.	Penata Muda Tingkat I	III/b	9
8.	Penata Muda	III/a	3
9.	Pengatur Tingkat I	II/d	1
10.	Pengatur	II/c	2
11.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2
12.	Tenaga Tidak Tetap	-	26
<b>Jumlah</b>			<b>112</b>



**Gambar 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Golongan**

b. Data Pegawai Menurut Jabatan

**Tabel 1.2 Data Pegawai Menurut Jabatan Struktural**

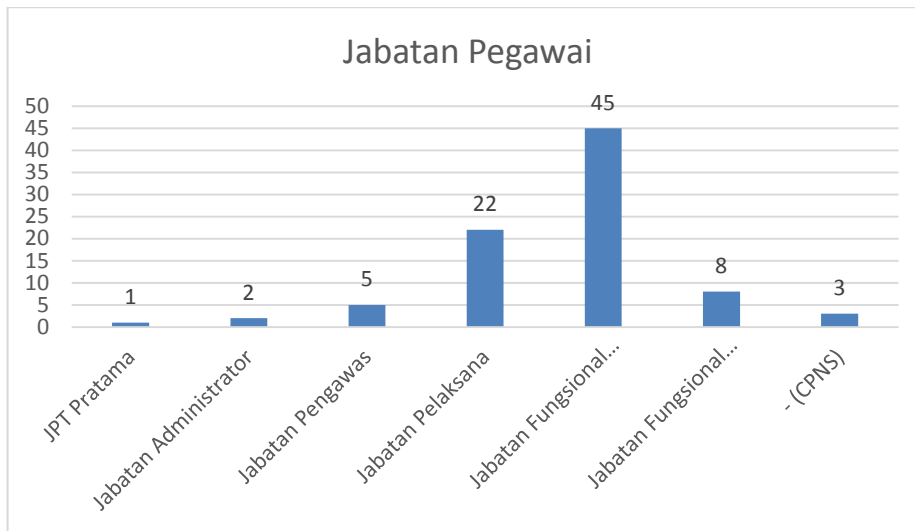
No.	Jabatan Struktural	Jumlah
1	Kepala Perwakilan	1
2	Kepala Subauditorat	1
3	Kepala Sekretariat	1
4	Kepala Subbagian	5
		8

**Tabel 1.3 Data Pegawai Menurut Jabatan Pegawai**

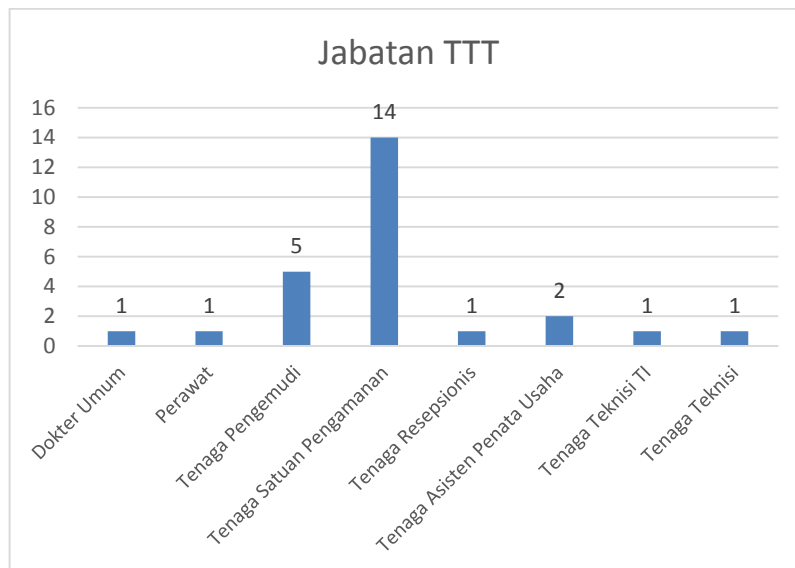
No.	Jabatan Pegawai	Jumlah
1	JPT Pratama	1
2	Jabatan Administrator	2
3	Jabatan Pengawas	5
4	Jabatan Pelaksana	22
5	Jabatan Fungsional Pemeriksa	45
6	Jabatan Fungsional Lainnya	8
7	CPNS	3
		86

**Tabel 1.4 Data Pegawai Menurut Jabatan Tenaga Tidak Tetap (TTT)**

No.	Jabatan Tenaga Tidak Tetap	Jumlah
1	Dokter	1
2	Perawat	1
3	Tenaga Pengemudi	5
4	Tenaga Satuan Pengamanan	14
5	Tenaga Resepsionis	1
6	Tenaga Asisten Penata Usaha	2
7	Tenaga Teknisi TI	1
8	Tenaga Teknisi	1
	Jumlah	26



**Gambar 1.3 Data Pegawai Menurut Jabatan Pegawai**

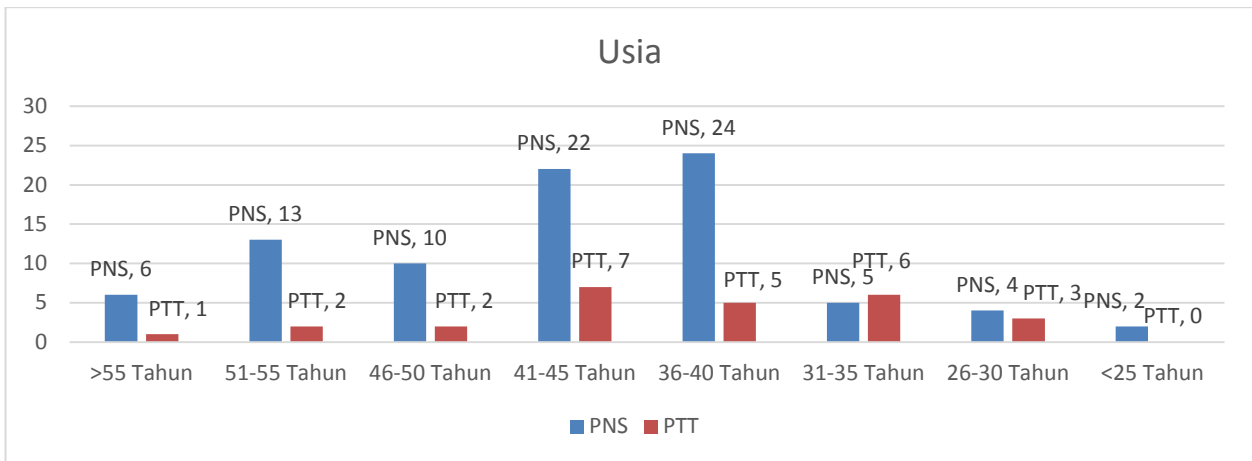


**Gambar 1.4 Data Pegawai Menurut Jabatan Tenaga Tidak Tetap**

c. Data Pegawai Menurut Umur

**Tabel 1.5 Data Pegawai Menurut Umur**

No.	Umur	PNS/CPNS	TTT	Jumlah
1	> 55 Tahun	6	1	7
2	51 - 55 Tahun	13	2	15
3	46 - 50 Tahun	10	2	12
4	41 - 45 Tahun	22	7	29
5	36 - 40 Tahun	24	5	29
6	31 - 35 Tahun	5	6	11
7	26 - 30 Tahun	4	3	7
8	<25 Tahun	2	0	2
	Total	86	26	112

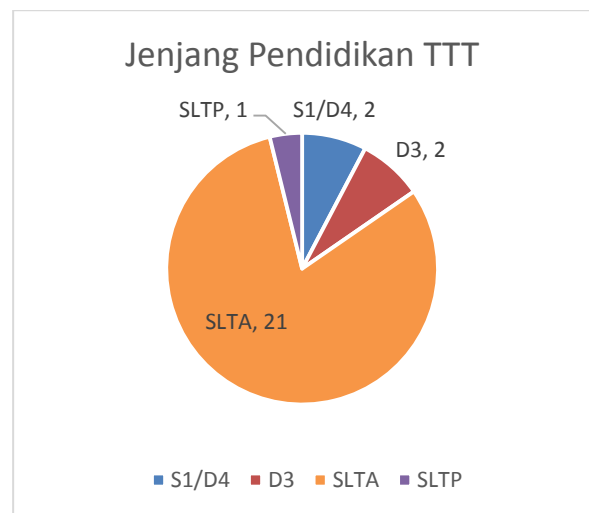
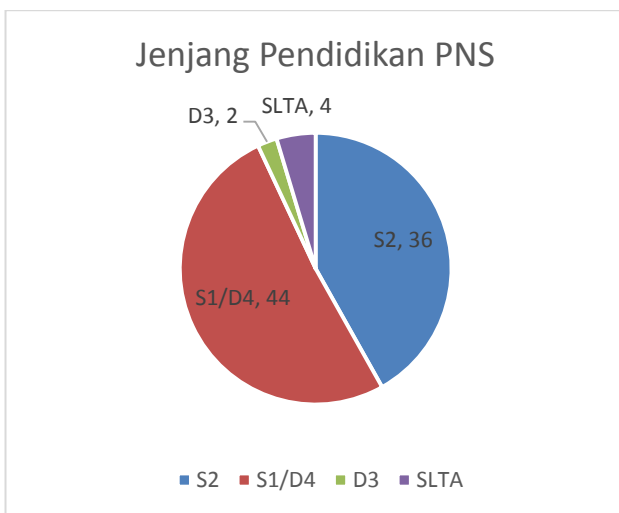


**Gambar 1.5 Data Pegawai Menurut Umur**

d. Data Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Pegawai

**Tabel 1.6 Data Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Pegawai**

No	Pendidikan	PNS/CPNS	TTT	Jumlah
1	Strata 2	36	-	36
2	Strata 1	44	2	46
3	D3	2	2	4
3	SLTA	4	21	25
4	SLTP	-	1	1
Total		86	26	112



**Gambar 1.6 Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan**



## 2. Sumber Daya Keuangan

Pagu anggaran BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta untuk tahun 2022 sebesar Rp15.577.574.000,00, secara rinci dijabarkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.7 Anggaran BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta Tahun 2022**

No	Jenis Output	Rencana	
		Vol	Anggaran (Rp)
<b>Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP)</b>			
1.	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan D.I. Yogyakarta	51	81.240.000
2.	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	1	8.866.000
3.	Sumbangan IHPS Perwakilan	2	25.958.000
4.	Laporan Profil Entitas perwakilan	6	5.220.000
5.	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta	12	43.920.000
6.	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta	12	86.328.000
7.	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	12	130.240.000
8.	LHP Perwakilan D.I. Yogyakarta	9	2.139.941.000
9.	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta	9	1.527.920.000
<b>JUMLAH RKP</b>			<b>4.049.633.000</b>
<b>RENCANA KEGIATAN SEKJEN DAN PENUNJANG</b>			
1.	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	20	235.000.000
2.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	9.727.547.000
	Gaji dan Tunjangan		5.437.465.000
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		4.290.082.000
3.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	43	155.834.000
4.	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	20	1.409.560.000
<b>JUMLAH RKSP</b>			<b>11.527.941.000</b>
<b>JUMLAH RKP DAN RKSP</b>			<b>15.577.574.000</b>

## 3. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung kegiatan Pemeriksaan dan Penunjang, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, diantaranya:

### a. Lantai 1

- Lobi resepsionis
- Ruang PIK
- Ruang Subbagian Umum dan TI
- Ruang Perpustakaan
- Poliklinik
- Ruang Rapat Kota Gede

- b. Lantai 2
  - Ruang Kepala Perwakilan
  - Ruang Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan
  - Ruang Kepala Sekretariat
  - Ruang Rapat Golong Gilig
- c. Lantai 3
  - Ruang Subbagian Keuangan
  - Ruang Subbagian SDM
  - Ruang Subbagian Hukum
  - Ruang Perpustakaan UJDIH
- d. Lantai 4
  - Ruang Subauditorat
  - Ruang Pengendali Teknis
  - Ruang Kepala Subauditorat
  - Ruang Rapat Merapi
- e. Halaman depan
- f. Halaman parkir motor
- g. Parkir mobil
- h. Ruang poll kendaraan
- i. Ruang Arsip
- j. Kantin
- k. Ruang dharma wanita
- l. Ruang koperasi
- m. Lapangan tenis
- n. Lapangan bola voli

## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN D.I. YOGYAKARTA**

#### **A. Rencana Strategis BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta**

Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta 2020 – 2024 merupakan dokumen awal dalam tahapan perencanaan strategis BPK untuk periode tahun 2020 – 2024 sebagai kelanjutan Renstra BPK periode sebelumnya. Periode penyusunan Renstra BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta 2020 – 2024 ini menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi selama lima tahun ke depan dengan menyelaraskan agenda pembangunan nasional dan merespon dampak pandemi COVID-19.

Hal ini merupakan langkah yang ditujukan agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang mendapat mandat melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan.

Nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme menjadi semangat moral yang selalu dijunjung tinggi dan diimplementasikan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab BPK. Selanjutnya, sistem pengendalian mutu BPK di tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi juga semakin dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan BPK. Renstra menjabarkan rancangan atas rencana lima tahunan BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan.

BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta terus berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. BPK Perwakilan D.I.

Yogyakarta akan berperan dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan melalui pemeriksaan. Selanjutnya, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta akan menyusun strategi pemeriksaan dan meningkatkan sinergi dengan Institusi Penegak Hukum (IPH) dalam merespon seluruh permintaan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli.

Untuk memperkuat sumber daya pemeriksaan, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta akan meningkatkan kualitas sumber daya yang andal dan profesional melalui peningkatan kompetensi. Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah "Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara".

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun tiga misi yakni (1) Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan "Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat".

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta akan mewujudkan sasaran strategis "Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi". Sasaran strategis dicapai melalui lima strategi yang dikelompokkan dalam dua arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program penganggaran BPK. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan.

Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

- Strategi 1 : Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis
- Strategi 2 : Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif
- Strategi 3 : Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan

keuangan negara

Strategi 4 : Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara

Strategi 5 : Memperkuat regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta

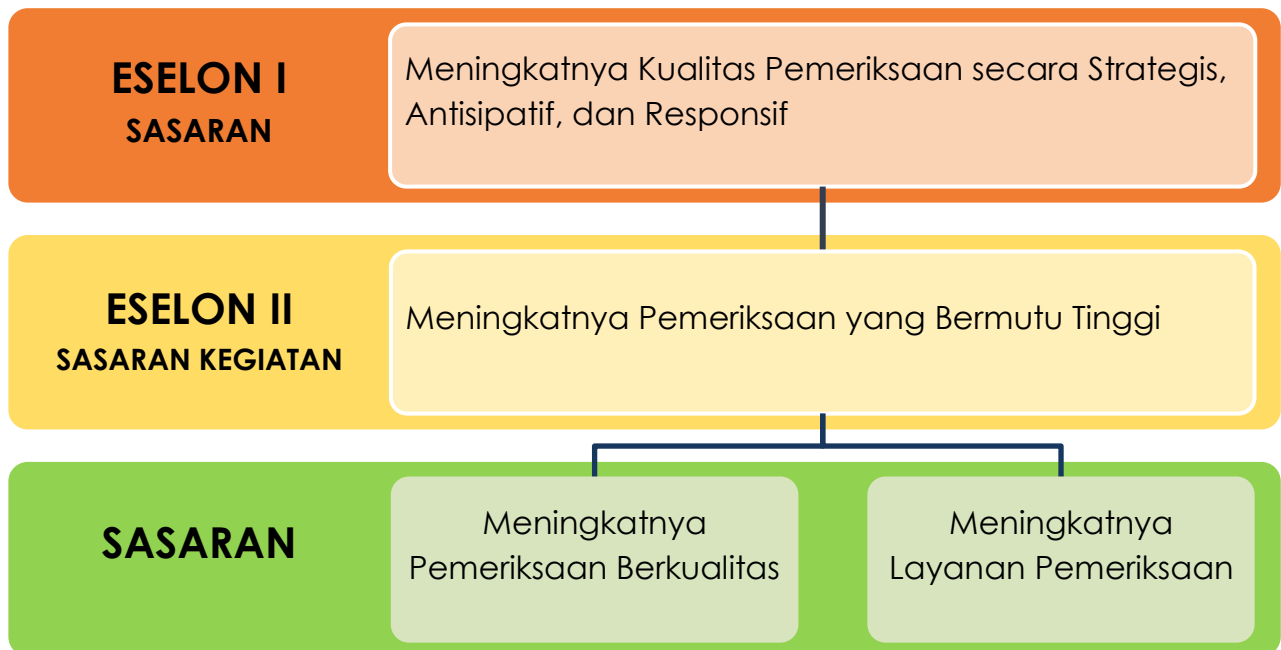
Arah kebijakan kedua adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan. Renstra BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta 2020-2024 didukung dengan kerangka kelembagaan yang disusun untuk meningkatkan kapasitas terutama pada pengembangan institusi, tata kelola, dan pegawai yang profesional.

Selanjutnya pelaksanaan renstra ini didukung oleh sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Selain itu, Rencana Implementasi Renstra (RIR) juga disusun untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan renstra. Pelaksanaan Renstra BPK 2020–2024 dan RIR akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Capaian renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2022 telah ditetapkan Pernyataan Komitmen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disepakati bersama oleh Kepala Perwakilan sebagai Kepala Satuan Kerja dan Tortama KN V selaku Atasan Kepala Perwakilan. Keterkaitan tugas dan fungsi BPK dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam Peta Strategi baik Tingkat Eselon I (Tortama KN V) maupun BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta.

Adapun sasaran strategis oleh AKN V adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 – Peta Strategis AKN V

## B. Pernyataan Komitmen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Untuk mengukur pencapaian sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah menyusun Strategi, Sasaran, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022. Berikut ini Sasaran, Sasaran Kegiatan, IKU dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta Tahun 2022:

Tabel 2.1 Sasaran, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama  
BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta

Sasaran	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas</li> <li>Meningkatnya Layanan</li> </ul>	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
		IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
		IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%

Sasaran	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
	Pemeriksaan	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)
		IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%
		IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%

### C. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2022 BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta

Untuk Tahun Anggaran 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah menetapkan Target Pencapaian Kinerja Tahunan dan Triwulanan yang diungkap dalam Rencana Aksi Pencapaian Kinerja 2022 sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Rencana Aksi Tahun 2022 Perwakilan D.I. Yogyakarta**

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesai an	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Strategi 2</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif</b>							
<b>Sasaran</b>	<b>Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi</b>							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	40%	40%	100%	Desember	Triwulan I: • Membentuk Tim Reviu Opini; • Melaksanakan diklat teknis.  Triwulan II: Melaksanakan pemenuhan <i>Quality Assurance (QA)</i> dan <i>Quality Control (QC)</i> atas Pemeriksaan LKPD TA 2021 dalam rangka mendukung penilaian evaluasi EPP dan reviu utama  Triwulan III: Melakukan evaluasi pemeriksaan.  Triwulan IV: Melaksanakan pemenuhan <i>Quality Assurance (QA)</i> dan <i>Quality Control (QC)</i> atas Pemeriksaan Kinerja dan DTT Semester II Tahun 2022 dalam rangka mendukung penilaian Evaluasi EPP dan Reviu Utama
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	Triwulan I: • Membentuk Tim Reviu Opini;



Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesai an	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan							<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan diklat teknis.</li> </ul> <p>Triwulan II: Melaksanakan konsinyering pemeriksaan untuk menerapkan <i>equal treatment</i> atas permasalahan yang sama.</p> <p>Triwulan III: Melakukan evaluasi pemeriksaan.</p> <p>Triwulan IV: Melaksanakan konsinyering pemeriksaan untuk menerapkan <i>equal treatment</i> atas permasalahan yang sama.</p>
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember	<p>Triwulan I: Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif juga yang berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p> <p>Triwulan II: Pemantauan TLRHP Reguler (Semester I Tahun 2022) dan menginput langsung di SIPTL</p> <p>Triwulan III: Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif juga yang berlarut-larut belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesai an	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
								Triwulan IV: Pemantauan TLRHP Reguler (Semester I Tahun 2022) dan menginput langsung di SIPTL.
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	-	-	50%	100%	Desember	Triwulan I: Mengidentifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional.
								Triwulan II: Mengusulkan hasil identifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional untuk selanjutnya diusulkan sebagai salah satu fokus pemeriksaan Semester II Tahun 2022.
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun usulan tim pemeriksaan;</li> <li>• Mengikuti workshop persiapan pemeriksaan; dan</li> <li>• Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci.</li> </ul>
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusi pelaporan hasil pemeriksaan; dan</li> <li>• Pembahasan rencana aksi dalam melaksanakan rekomendasi</li> </ul>
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	Triwulan I : Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesai an	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>Triwulan II: Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p> <p>Triwulan III: Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p> <p>Triwulan IV: Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p>
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	-	-	50%	100%	Desember	<p>Triwulan I: Mengidentifikasi isu strategis lokal.</p> <p>Triwulan II: Mengusulkan hasil identifikasi isu strategis lokal untuk selanjutnya diusulkan sebagai salah satu fokus pemeriksaan Semester II Tahun 2022.</p> <p>Triwulan III:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun usulan tim pemeriksaan; dan</li> <li>• Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci.</li> </ul> </p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusi pelaporan hasil pemeriksaan;</li> <li>• Pembahasan rencana aksi dalam melaksanakan rekomendasi;</li> <li>• Mengisi survey.</li> </ul>
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	-	-	-	Sangat Memuaskan (5,00)	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internalisasi nilai-nilai dasar dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja;</li> <li>• Mencantumkan nilai-nilai dasar dalam Surat Tugas;</li> <li>• Memberikan apresiasi kepada pegawai yang berprestasi dan sanksi kepada pegawai yang melanggar.</li> <li>• Sosialisasi visi, misi BPK kepada pegawai</li> <li>• Arahan Kepala Perwakilan tentang Independensi, Integritas, Profesional</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internalisasi nilai-nilai dasar dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja;</li> <li>• Mencantumkan nilai-nilai dasar dalam Surat Tugas;</li> <li>• Memberikan apresiasi kepada pegawai yang berprestasi dan sanksi kepada pegawai yang melanggar.</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internalisasi nilai-nilai dasar dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja;</li> <li>• Mencantumkan nilai-nilai dasar dalam Surat Tugas;</li> <li>• Memberikan apresiasi kepada pegawai yang berprestasi dan sanksi kepada pegawai yang melanggar.</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesai an	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internalisasi nilai-nilai dasar dalam setiap pengarahannya dan rapat unit kerja;</li> <li>• Mencantumkan nilai-nilai dasar dalam Surat Tugas; Memberikan apresiasi kepada pegawai yang berprestasi dan sanksi kepada pegawai yang melanggar</li> </ul>
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	-	-	-	A (88,00)	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2022;</li> <li>• Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;</li> <li>• Menyusun Laporan Reviu Pencapaian Kinerja Triwulan I.</li> </ul>
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;</li> <li>• Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan I tahun 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasarkan hasil evaluasi;</li> <li>• Menyusun Laporan Reviu Pencapaian Kinerja Triwulan II dengan memperhatikan capaian kinerja pada Triwulan I yang belum tercapai.</li> </ul>
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;</li> <li>• Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan II tahun 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasarkan hasil evaluasi;</li> <li>• Menyusun Laporan Reviu Pencapaian Kinerja Triwulan III dengan memperhatikan capaian kinerja pada Triwulan II yang belum tercapai.</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;</li> <li>• Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan III tahun 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasarkan hasil evaluasi;</li> <li>• Menyusun Laporan Reviu Pencapaian Kinerja Triwulan IV dengan memperhatikan capaian kinerja pada Triwulan III yang belum tercapai.</li> </ul>
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	97%	97%	97%	97%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan disposisi melalui aplikasi persuratan;</li> <li>• Melakukan korespondensi pekerjaan melalui official e-mail;</li> <li>• Pelaksanaan himbauan memanfaatkan IT dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja;</li> <li>• Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan disposisi melalui aplikasi persuratan;</li> <li>• Melakukan korespondensi pekerjaan melalui official e-mail;</li> <li>• Pelaksanaan himbauan memanfaatkan IT dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja;</li> <li>• Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan disposisi melalui aplikasi persuratan;</li> <li>• Melakukan korespondensi pekerjaan melalui official e-mail;</li> <li>• Pelaksanaan himbauan memanfaatkan IT dalam setiap</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>pengarahan dan rapat unit kerja;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus; tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.</li> </ul>
								<p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan disposisi melalui aplikasi persuratan;</li> <li>• Melakukan korespondensi pekerjaan melalui official e-mail;</li> <li>• Pelaksanaan himbauan memanfaatkan IT dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja;</li> <li>• Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.</li> </ul>
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	6,25%	12,5%	18,75%	100%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Penerapan Best Practice tahun 2021 (Penerapan BP 2021 dan Replikasi BP);</li> <li>• Inventarisir usulan Best Practice di Perwakilan;</li> <li>• Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Pelaksanaan Diklat LKPD persiapan pelaksanaan Pemeriksaan LKPD TA 2021);</li> <li>• Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Pelaksanaan Bantuan Rekan Sejawat/Peer Assist);</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Pelaksanaan Coaching);</li> <li>• Inventarisir Replikasi BP untuk diterapkan.</li> <li>• Penyusunan usulan Best Practise dan replikasi Best Practise.</li> </ul> <p>Triwulan III:</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesai an	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
								<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Pelaksanaan Habitiasi/Mentoring CPNS);</li> <li>Penyusunan usulan Best Practise dan replikasi Best Practise.</li> </ul>
								<p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Pelaksanaan Mentoring atas Pelaksanaan PKL Anak Sekolah/Magang);</li> <li>Mengusulkan Best Practise dan replikasi Best Practise.</li> </ul>
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	Memuaskan (3,80)	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas;</li> <li>Membuat pernyataan independensi dan pakta integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan;</li> <li>Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i>;</li> <li>Menyebarkan kuisisioner IIP setelah selesai pekerjaan lapangan.</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas;</li> <li>Membuat pernyataan independensi dan pakta integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan;</li> <li>Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i>;</li> <li>Menyebarkan kuisisioner IIP setelah selesai pekerjaan lapangan.</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas;</li> <li>Membuat pernyataan independensi dan pakta integritas</li> </ul>



Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesai an	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
								<p>sebelum melaksanakan pemeriksaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i>;</li> <li>• Menyebarkan kuisisioner IIP setelah selesai pekerjaan lapangan.</li> </ul>
								<p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas;</li> <li>• Membuat pernyataan independensi dan pakta integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan;</li> <li>• Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i>;</li> <li>• Evaluasi hasil kuisisioner IIP dan menindaklanjuti jika hasilnya tidak memuaskan.</li> </ul>
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	Jan 40% Feb 45% Mar 48%	Apr 48% Mei 48% Juni 50%	Juli 50% Ags 55% Sep 60%	Okt 60% Nov 75% Des 100%	Desember	<p>Januari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> <li>• Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai.</li> <li>• Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai.</li> </ul> <p>Februari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesai an	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
								<p>Maret:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p>April:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p>Mei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p>Juni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesai an	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
								<p>Juli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p>Agustus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p>September:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p>Oktober:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p>November:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesai an	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Desember: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul>
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	88%	88%	88%	88%	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA.2021 dan Kebijakan TA. 2021;</li> <li>• Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran;</li> <li>• Menyusun data capaian output;</li> <li>• Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang mana proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran;</li> <li>• Menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan.</li> </ul> Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan;</li> <li>• Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun;</li> <li>• Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya s.d. Rp 200 juta diselesaikan maksimal triwulan II;</li> <li>• Mempercepat proses lelang untuk belanja modal yang terkena blokir.</li> </ul> Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan;</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesai an	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proposional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun;</li> <li>• Melakukan koordinasi internal untuk memantau penyerapan anggaran triwulan I dan II dan segera melaksanakan kegiatan yang belum terlaksana di triwulan I dan II atau melakukan revisi apabila kegiatan tersebut tidak bisa terlaksana.</li> </ul>
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan;</li> <li>• Melakukan rewiu dan optimalisasi kegiatan yang belum terlaksana;</li> <li>• segera melakukan revisi belanja pegawai apabila terdapat indikasi kekurangan.</li> </ul>

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**  
**(EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA)**  
**BPK PERWAKILAN D.I. YOGYAKARTA**

**A. Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta**

Pengukuran capaian kinerja Triwulan II tahun 2022 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta. Berdasarkan hasil pengukuran capaian target kinerja yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK, maka skor yang diperoleh terhadap capaian target dimaksud adalah sebesar 62,71. Realisasi target masing-masing indikator kinerja utama Triwulan II tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

**Tabel 3.1 Pencapaian IKU BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta Triwulan II Tahun 2022**

Strategi (S)		Target	Realisasi	Skor	Keterangan
Indikator Kinerja Utama (IKU)		TW II 2022	TW II 2022	TW II 2022	
1	2	3	4	5	6
<b>S</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif</b>				
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	40,00%	40,00%	100,00	
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	0,00%	0,00%	0,00	
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,00%	93,39%	105,00	
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	0,00%	0,00%	0,00	
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100,00%	100,00%	100,00	
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100,00%	100,00%	100,00	
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	-	-	0,00	
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	-	-	0,00	
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	50,00%	67,99%	105,00	
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	25,00%	51,43%	105,00	

Strategi (S)		Target	Realisasi	Skor	Keterangan
Indikator Kinerja Utama (IKU)		TW II 2022	TW II 2022	TW II 2022	
1	2	3	4	5	6
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	-	-	0	
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	50,00%	71.08%	105,00	
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88,00%	80.44%	91.41	

## B. Indikator Kinerja BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta

Strategi : Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Sasaran : Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi

### IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance (QA)* dan *Quality Control (QC)* maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reuiu Itama.

Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksa (PSP). Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan.

Hasil Reviu Itama merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada seluruh satuan kerja pemeriksaan dengan metode sampling.

Indikator ini bertujuan untuk untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan.

Pada triwulan II Tahun 2022, Perwakilan D.I. Yogyakarta telah melakukan proses QC dan QA atas 3 LHP LKPD yaitu LHP LKPD D.I.Y, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemda dalam Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 Pada Pemerintah Daerah DIY dengan target IKU 1 sebesar 40% dan realisasi sebesar 40%.

Atas IKU 1, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 100.

## **IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan**

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh satuan kerja pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Pada triwulan II Tahun 2022, target IKU 2 sebesar 0% dan belum terdapat penilaian dari EPP sehingga realisasi sebesar 0%. Atas IKU 2, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 0.

## **IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan**

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Pada triwulan II Tahun 2022, target IKU 3 sebesar 75% dengan realisasi sebesar 93,39%.

IKU 3 dapat tercapai dengan cara:

1. Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.
2. Rekomendasi yang bersifat administrasi dikomunikasikan kepada auditee agar dapat segera ditindaklanjuti.
3. Melakukan komunikasi secara intensif tindak lanjut dengan entitas yang dilakukan melalui daring.

Atas IKU 3, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 105.

## **IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional**

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional



dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator.

Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pada triwulan II Tahun 2022, Perwakilan D.I. Yogyakarta belum melaksanakan pemeriksaan tematik nasional sehingga target IKU 4 sebesar 0% dengan realisasi sebesar 0%. Atas IKU 4, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 0.

#### **IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan**

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsivitas BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Pada triwulan II tahun 2022, target IKU 5 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Standar penilaian IKU 5 yaitu 100%, bila terdapat permintaan perhitungan kerugian negara dan sebagainya maka nilai dapat bertambah. Pada triwulan II Tahun 2022 belum ada permintaan dari pemangku kepentingan sehingga atas IKU 5, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 100.

#### **IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal**

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi

tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Atas IKU ini BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta pada triwulan II Tahun 2022 telah melaksanakan Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemda dalam Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 Pada Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta sehingga target IKU 6 sebesar 100% dapat direalisasikan sebesar 100%. Atas IKU 6 BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 100.

### **IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK**

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

Skala hasil survei:

1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan

2,00 - 2,99 = tidak memuaskan

3,00 - 3,99 = memuaskan

4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK. Pada triwulan II Tahun 2022, survei tersebut belum dilakukan sehingga target IKU 7 sebesar 0 dengan realisasi sebesar 0. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 0.

### **IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP**

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut:

- o AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- o A = Memuaskan (>80-90)
- o BB = Sangat Baik (>70-80)
- o B = Baik (>60-70)
- o CC = Cukup (>50-60)

- o C = Kurang (>30-50)
- o D = Sangat Kurang (0-30)

Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK.

Pada triwulan II Tahun 2022, target IKU 8 sebesar 0 dan belum terdapat hasil evaluasi AKIP oleh Itama sehingga realisasi sebesar 0. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 0.

### **IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi**

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (*e-mail, e-Drive, portal*), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (*SMP, SiAP, SiPTL, Big Data Analytic*). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan.

Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh satuan kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong satuan kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pada triwulan II tahun 2022, target IKU 9 sebesar 50% dengan realisasi sebesar 67,99%. Atas hal tersebut, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 105.

IKU 9 dapat tercapai dengan cara:

1. Memberikan disposisi melalui aplikasi persuratan;
2. Melakukan korespondensi pekerjaan melalui official email;
3. Pelaksanaan himbauan memanfaatkan IT dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja.

### **IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan**

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

*Innovative Practice* menekankan pada inovasi/kebaruan/update atas *Best Practice* yang ada, dan dapat direalisasikan melalui:

1. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP. Satuan kerja dapat mengajukan kembali usulan *best practice* yang pernah diajukan pada tahun sebelumnya, dengan menarasikan aspek inovasi/kebaruan/update.
2. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP. Satuan kerja yang mengimplementasi BP perlu menyusun laporan atas kegiatan implementasi tersebut dan menarasikan aspek inovasi/kebaruan/update atas BP yang diimplementasi.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Pada triwulan II Tahun 2022, target IKU 10 sebesar 25% dengan realisasi sebesar 51.43%. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 105.

### **IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi**

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan.

Skala hasil survei:

1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan

2,00 - 2,99 = tidak memuaskan

3,00 - 3,99 = memuaskan

4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Pada triwulan II tahun 2022, target IKU 11 sebesar 0 dengan realisasi sebesar 0, hal ini dikarenakan survei tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi belum dilaksanakan. Atas IKU ini, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 0.

## **IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi**

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut:

1. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN).
2. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU Nomor 5 Tahun 2014).
3. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.

*Cut off* perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September.

Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama. Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Pada triwulan II Tahun 2022, target IKU 12 sebesar 50% dengan realisasi sebesar 71.08%. Atas hal tersebut, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 105.

## **IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran**

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu:

1. Capaian *output*
2. Penyerapan anggaran
3. Efisiensi
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktivitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dibidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran.

Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode. Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Pada triwulan II Tahun 2022, target IKU 13 sebesar 88% dengan realisasi sebesar 80.44%. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 91.41%. IKU 13 tidak tercapai sesuai target karena jadwal pemeriksaan yang

rencananya dilaksanakan di semester I mundur akibat adanya pemblokiran anggaran.

### C. Realisasi Anggaran Perwakilan D.I. Yogyakarta

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh anggaran sebesar Rp15.577.574.000,00 Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp7.453.116.917,00 atau sebesar 47.85%.

**Tabel 3.2 Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2022**

No	Jenis Output	Rencana		Realisasi s.d. TW II Tahun 2022
		Vol	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)
<b>Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP)</b>				
1.	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan DIY	51	81.240.000	64.072.000
2.	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	1	8.866.000	0
3.	Sumbangan IHPS Perwakilan	2	25.958.000	18.518.627
4.	Laporan Profil Entitas	6	5.220.000	0
5.	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan DIY	12	43.920.000	0
6.	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	12	86.328.000	0
7.	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	12	130.240.000	48.957.022
8.	LHP BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta	9	2.139.941.000	1.099.745.216
9.	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta	9	1.527.920.000	600.714.220
<b>JUMLAH RKP</b>			<b>4.049.633.000</b>	<b>1.832.007.085</b>
<b>RENCANA KEGIATAN SEKJEN DAN PENUNJANG</b>				
1.	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	20	235.000.000	70.750.000
2.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	9.727.547.000	5.077.820.218
3.	Layanan Sarana Prasarana Internal	43	155.834.000	88.074.000
4.	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	20	1.409.560.000	384.465.614
<b>JUMLAH RKSP</b>			<b>11.527.941.000</b>	<b>5.621.109.832</b>

No	Jenis Output	Rencana		Realisasi s.d. TW II Tahun 2022
		Vol	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)
<b>JUMLAH RKP DAN RKSP</b>			<b>15.577.574.000</b>	<b>7.453.116.917</b>

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 yaitu:

1. Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP)

Ringkasan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II, yaitu:

- 1) LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan D.I. Yogyakarta  
Pada Tahun Anggaran 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menargetkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik sebanyak 51 LHP dengan anggaran Rp81.240.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan Pemeriksaan atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik dengan menghasilkan 51 Laporan Hasil Pemeriksaan dengan realisasi sebesar Rp64.072.000,00 (78,87%).
- 2) Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan  
Pada Tahun Anggaran 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menargetkan 1 Laporan Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan dengan anggaran Rp8.866.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta belum melaksanakan kegiatan yang menghasilkan Laporan Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan.
- 3) Sumbangan IHPS Perwakilan  
Pada Tahun Anggaran 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menargetkan 2 Laporan Sumbangan IHPS dengan anggaran Rp25.958.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah menghasilkan 1 sumbangan IHPS dengan realisasi sebesar Rp18.518.627,00 (71,34%).
- 4) Laporan Profil Entitas Perwakilan  
Pada Tahun Anggaran 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menargetkan 6 Laporan Profil Entitas dengan anggaran Rp5.220.000. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta belum melaksanakan kegiatan yang menghasilkan Laporan Profil Entitas Perwakilan.
- 5) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Perwakilan D.I. Yogyakarta



Pada Tahun Anggaran 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menargetkan 12 Laporan Pemantauan TLHP dengan anggaran Rp43.920.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta belum melaksanakan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

6) Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah Perwakilan D.I. Yogyakarta

Pada Tahun Anggaran 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menargetkan 12 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dengan anggaran Rp86.328.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta belum melaksanakan kegiatan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.

7) Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan

Pada Tahun Anggaran 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menargetkan 12 Laporan Layanan Manajemen Pemeriksaan dengan anggaran Rp130.240.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah menghasilkan 6 laporan layanan manajemen pemeriksaan dengan realisasi sebesar Rp48.957.022,00 (37,59%).

8) LHP BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta

Pada Tahun Anggaran 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menargetkan output Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 9 LHP dengan anggaran sebesar Rp2.139.941.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan Pemeriksaan dengan menghasilkan 7 Laporan Hasil Pemeriksaan dengan realisasi sebesar Rp1.099.745.216,00 (51,39%).

9) LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta

Pada Tahun Anggaran 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menargetkan output Laporan Hasil Pemeriksaan Interim/Pendahuluan (LHPI/P) sebanyak 9 Laporan dengan anggaran sebesar Rp1.527.920.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah menghasilkan 4 laporan Pemeriksaan Interim/Pendahuluan dengan realisasi sebesar Rp600.714.220,00 (39,32%).

2. Rencana Kegiatan Sekjen dan Penunjang (RKSP)

Ringkasan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 yaitu:

1) Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta merencanakan untuk melaksanakan pengadaan 20 unit Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan anggaran Rp235.000.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah melaksanakan pengadaan Sarana

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebanyak 10 Unit dengan realisasi sebesar Rp70.750.000,00 (30,11%).

2) Layanan Dukungan Manajemen Internal

a) Gaji dan Tunjangan

BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menganggarkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp5.437.465.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp3.468.958.729,00 (63,80%).

b) Operasional dan Pemeliharaan Kantor

BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menganggarkan untuk layanan perkantoran sebesar Rp4.290.082.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah merealisasikan layanan perkantoran sebesar Rp1.608.861.489,00 (37,50%).

3) Layanan Sarana dan Prasarana Internal

BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta merencanakan untuk melakukan pengadaan 43 unit Sarana dan Prasarana Internal dengan anggaran Rp155.834.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah melaksanakan pengadaan Sarana dan Prasarana Internal sebanyak 22 unit dengan realisasi sebesar Rp88.074.000,00 (56,52%).

4) Layanan Manajemen Internal Perwakilan

BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta merencanakan untuk melaksanakan Layanan Manajemen Internal Perwakilan dengan anggaran Rp1.409.560.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah melaksanakan Layanan Manajemen Internal Perwakilan dengan menghasilkan 11 Laporan Layanan Manajemen Internal Perwakilan dengan realisasi sebesar Rp384.465.614,00 (27,28%).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Reviu Pencapaian Kinerja Triwulan II Tahun 2022 BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta ini merupakan perwujudan pencapaian kinerja baik itu keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Secara umum, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta terus berupaya dengan optimal dalam mencapai target yang ditetapkan walaupun belum sepenuhnya tercapai yang terlihat dari total skor kinerja pada triwulan II Tahun 2022 sebesar 62.71.

Penyusunan Laporan Reviu Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.

# LAMPIRAN

**PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA  
BPK PERWAKILAN D.I. YOGYAKARTA  
TRIWULAN II TAHUN 2022**

PERSPEKTIF, SS DAN IKU		Target	Realisasi	Skor	SKOR KINERJA
<b>SKOR KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI D. I. YOGYAKARTA</b>					<b>62.71</b>
<b>SASARAN KEGIATAN</b>					<b>62.71</b>
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	40.00%	40.00%	100.00	
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	0.00%	0.00%	0.00	
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75.00%	93.39%	105.00	
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	0.00%	0.00%	0.00	
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100.00%	100.00%	100.00	
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100.00%	100.00%	100.00	
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK		0.00	0.00	
8	Hasil Evaluasi AKIP		0.00	0.00	
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	50.00%	67.99%	105.00	
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	25.00%	51.43%	105.00	
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi		0.00	0.00	
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	50.00%	71.08%	105.00	
13	Tingkat Kinerja Anggaran	88.00%	80.44%	91.41	